

**DETERMINAN NILAI MAHAR
PERKAWINAN: TEMUAN DARI
*INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY
(IFLS) EAST***

**OLEH
RANDI KURNIAWAN
SALMAN SAMIR**

MEI 2019



LOGOV
CELEBES



ABSTRAK

DETERMINAN NILAI MAHAR PERKAWINAN: TEMUAN DARI INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY (IFLS) EAST

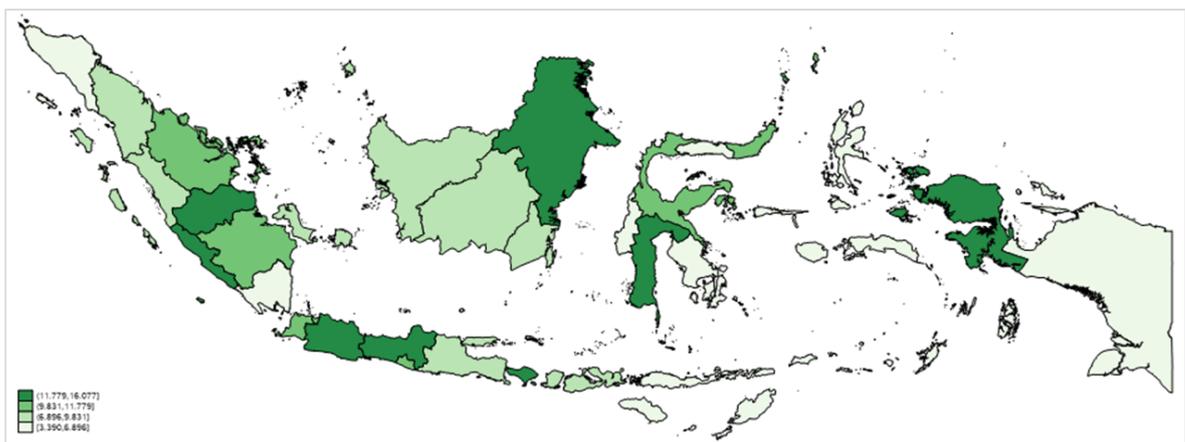
RANDI KURNIAWAN, SALMAN SAMIR

Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah mahar/hadiah perkawinan. Studi ini menggunakan sampel individu perempuan (N=1.532) dari data *The Indonesia Family Life Survey (IFLS)* yang tinggal di tujuh provinsi di Indonesia bagian timur.

Dengan menggunakan regresi multivariat, hasil studi ini menemukan bahwa status ekonomi keluarga perempuan dan tingkat pendidikan perempuan berpengaruh positif terhadap jumlah mahar/hadiah perkawinan. Faktor geografis, suku, dan agama juga dapat menjelaskan variasi jumlah mahar/hadiah perkawinan pada masyarakat di Indonesia bagian timur. Perempuan yang menikah di provinsi NTT secara rata-rata menerima mahar/hadiah perkawinan yang lebih tinggi dibanding sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, perempuan yang beragama Islam juga secara rata-rata memperoleh mahar yang lebih tinggi dibanding penganut agama lainnya. Sementara itu, suku Bugis-Makassar-Toraja memperoleh jumlah mahar yang lebih tinggi dibanding suku Ambon, tapi tidak berbeda dengan suku Jawa. Hasil studi ini menyediakan bukti ilmiah terhadap opini yang berkembang di masyarakat mengenai alasan tingginya mahar/hadiah perkawinan.

LATAR BELAKANG

Pesta perkawinan di Indonesia termasuk yang termahal dan termewah di dunia. Perkawinan memang erat kaitannya dengan adat istiadat yang secara turun temurun tetap dilestarikan hingga saat ini. Dengan adat istiadat yang beraneka ragam, prosesi perkawinan juga memiliki keunikan yang berbeda-beda. Hal ini turut berkontribusi pada perbedaan biaya pesta perkawinan antar wilayah. Gambar 1 menunjukkan rata-rata biaya perkawinan per provinsi di Indonesia pada tahun 2017 yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



Sumber: Susenas 2017 (diolah)

Gambar 1. Rata-rata Biaya Perkawinan per Provinsi di Indonesia (Rp Ribu)

Dari Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata biaya perkawinan 25% tertinggi terdapat di Provinsi Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sebagian besar dari provinsi tersebut memang masih kental pengaruh adat istiadat dalam prosesi perkawinan, seperti adat Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam prosesi pernikahan suku Bugis, terdapat sejumlah proses adat yang cukup panjang dan meriah karena melibatkan keluarga besar dari kedua calon mempelai, diantaranya *mammanu-manu* (penjajakan), *madduta* (melamar), *mappacci* (upacara penyucian), dan lain sebagainya. Prosesi perkawinan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Tingginya biaya perkawinan di Indonesia menimbulkan beban ekonomi dan sosial kepada keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Biaya dalam proses perkawinan umumnya terbagi dua, yaitu biaya untuk keperluan resepsi perkawinan atau upacara adat dan biaya berupa penyerahan sejumlah uang atau barang antar keluarga sebagai mahar atau hadiah perkawinan.

Besar kecilnya biaya resepsi dan mahar/hadiah perkawinan sangat tergantung dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan keluarga yang melangsungkan perkawinan.

Prosesi perkawinan umumnya diawali dengan pemberian uang/barang dari pihak keluarga laki-laki ke perempuan, atau dari pihak keluarga perempuan ke laki-laki. Dalam literatur, pemberian uang/barang dari pihak keluarga laki-laki ke perempuan disebut dengan *bride-price*, sedangkan pemberian dari pihak keluarga perempuan ke laki-laki disebut dengan *dowry*. Di Indonesia, umumnya pihak keluarga laki-laki sebagai pemberi. Sebaliknya di negara lain, seperti India, pihak keluarga perempuan sebagai pemberi.

Beberapa suku di Indonesia, seperti Bugis dan Sumba, biaya perkawinan yang tinggi, tidak hanya bersumber dari prosesi adat perkawinan, tapi juga dari besaran nilai uang/barang yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Syarat ini disebut dengan uang *panai'* di masyarakat Bugis dan *belis'* bagi masyarakat Sumba. Uang *panai'* atau *belis'* sudah menjadi tradisi turun temurun di masing-masing suku. Menariknya, nilai uang *panai'* atau *belis'* ini dari waktu ke waktu semakin tinggi, sehingga menimbulkan beban ekonomi kepada pihak keluarga laki-laki.

Hingga saat ini, belum ada studi dengan kasus di Indonesia yang mengkaji secara empiris faktor penentu tingginya biaya perkawinan, terutama dari nilai uang/barang yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki ke perempuan sebagai syarat perkawinan. Sejauh ini, alasan yang dikemukakan masih bersifat opini, seperti status sosial ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki, tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki, dan latar belakang suku. Studi bertujuan untuk menganalisis faktor penentu tinggi rendahnya mahar/hadiah perkawinan dengan menggunakan observasi perempuan di sejumlah provinsi di Indonesia bagian timur. Tradisi perkawinan sesuai adat istiadat yang masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia bagian timur melatarbelakangi pemilihan sampel studi ini.

KAJIAN LITERATUR

Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan di sebagian besar masyarakat (Zhang & Chan, 1999). Pola perkawinan berimplikasi utama pada berbagai faktor, seperti jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk; partisipasi tenaga kerja perempuan; ketimpangan pendapatan, kemampuan, dan karakteristik lainnya antar anggota keluarga; alokasi waktu luang dan sumber daya dalam keluarga (Becker, 1973). Studi mengenai perkawinan telah banyak dilakukan, baik dari segi teoritis maupun empiris.

Becker (1973) mengemukakan alasan terjadinya perkawinan. Karena bersifat sukarela, orang yang melakukan perkawinan diasumsikan memiliki dorongan untuk memperoleh kepuasan (utilitas) yang lebih tinggi daripada tetap hidup sendiri (*single*). Kepuasan tersebut terutama diperoleh dari adanya kesempatan bagi pasangan untuk memiliki anak kandung dan menjalin hubungan fisik dan emosional, yang disebut dengan “cinta”.

Pada saat perkawinan terjadi, terdapat transfer uang atau barang antar keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam literatur ekonomi, dikenal dua istilah untuk menamakan transfer tersebut, yaitu *bride-price* dan *dowry*. Jika pihak perempuan mengalami surplus, atau lebih banyak yang diterima dari keluarga laki-laki daripada yang diserahkan, maka disebut “*bride-price*”. Sebaliknya, apabila yang diterima keluarga laki-laki lebih besar dari yang diserahkan ke keluarga perempuan, maka surplus tersebut disebut “*dowry*” (Becker, 1973).

Dowry atau *bride-price* merupakan harga untuk memperoleh pasangan yang tepat di pasar perkawinan. *Dowry* atau *bride-price* juga dianggap sebagai instrumen pelengkap untuk penegakan kontrak perkawinan yang efisien (Zhang & Chan, 1999). Menurut Rosen dalam Zhang & Chan (1999), *bride-price* menunjukkan fungsi hedonis (*hedonic function*) yang memetakan karakteristik pengantin laki-laki dan perempuan (atau perbedaan karakteristik antar keduanya) yang berujung pada transfer uang atau barang antar kedua keluarga.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengkaji determinan besar kecilnya *bride-price* atau *dowry*, serta implikasinya, terutama kepada perempuan. Studi Gaspard & Platteau (2010) menemukan bahwa rata-rata *bride-price* untuk perempuan yang berpendidikan (telah menyelesaikan pendidikan dasar) secara signifikan lebih tinggi dibanding *bride-price* untuk perempuan yang tidak berpendidikan.

Sementara itu, *bride-price* lebih rendah pada perempuan yang berstatus janda dibanding yang masih gadis. Studi di India, dimana pihak keluarga perempuan yang memberikan *dowry* kepada keluarga laki-laki, menemukan bahwa faktor-faktor seperti, lama pendidikan, status ekonomi, kasta, agama, dan tipe keluarga dari laki-laki memegang peran penting dalam penentuan jumlah *dowry*. Studi Afzal (2009) di Pakistan juga menemukan bahwa kepemilikan lahan oleh keluarga laki-laki dan tingkat pendidikan ayah dari laki-laki berpengaruh positif terhadap jumlah *dowry*.

Studi Zhang & Chan (1999) di Taiwan menemukan bahwa semakin tinggi *dowry*, maka semakin tinggi kemungkinan suami (laki-laki) melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan besar kecilnya *bride-price* tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan tersebut. Temuan ini mendukung teori bahwa *dowry* dapat meningkatkan kesejahteraan istri melalui efek pendapatan dan efek daya tawar.

Di sisi lain, tradisi *bride-price* berpengaruh positif terhadap pembentukan modal manusia. Studi Ashraf, Bau, Nunn, & Voena (2016) di Indonesia menemukan bahwa orang tua yang berasal dari wilayah dengan tradisi *bride-price*, cenderung berinvestasi lebih tinggi pada pendidikan anak perempuan. Dengan demikian pendidikan anak perempuan cenderung lebih tinggi pada masyarakat yang menerapkan *bride-price*. *Dowry* juga dapat meningkatkan status perempuan di rumah tangga yang dibangun bersama suaminya, terutama bila perempuan tersebut tidak memiliki hak warisan dari keluarganya (Makino, 2017).

DATA DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari *the Indonesia Family Life Survey (IFLS) East 2012*. Data IFLS East merupakan survei rumah tangga dan komunitas yang berskala besar dan multi-topik yang mencakup kondisi kehidupan masyarakat di sejumlah provinsi di Indonesia bagian timur. Survei ini mengumpulkan observasi sekitar 10.000 individu dan 2.500 rumah tangga yang tinggal di 99 komunitas (area enumerasi), serta tersebar di tujuh provinsi bagian timur Indonesia, meliputi: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua (Sikoki, Witoelar, Strauss, Meijer, & Suriastini, 2013).

Penelitian ini menggunakan sampel perempuan berumur 15 – 49 tahun yang menikah pertama kali, dimana terdapat 1.532 observasi yang memenuhi kriteria. Karena data IFLS East baru dikumpulkan satu periode, yaitu tahun 2012, maka data yang digunakan berbentuk *cross section*. Sementara itu, untuk melihat pengaruh berbagai faktor yang diduga menentukan jumlah *bride-price*, maka model estimasi yang digunakan adalah regresi multivariat dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

Model estimasi yang digunakan mengacu pada model Edlund (2006) dengan beberapa modifikasi. Variabel dependen adalah besarnya mahar/hadiah perkawinan. Jumlah mahar diperoleh dari pertanyaan di IFLS, yaitu: “seberapa besar nilai mahar (*dowry*) dari perkawinan terakhir saat perkawinan berlangsung?”. Sementara jumlah hadiah diperoleh dari pertanyaan lanjutan mengenai nilai hadiah jika responden menerima hadiah yang tidak dikonsumsi pada saat pesta perkawinan. Di Indonesia, umumnya pemberian keluarga laki-laki ke keluarga perempuan dapat berupa uang maupun hadiah dalam bentuk barang, sehingga kedua bentuk pemberian tersebut diakumulasi untuk mendapatkan total pemberian keluarga laki-laki. Biaya mahar/hadiah perkawinan ini tidak mencakup biaya untuk resepsi atau prosesi pesta perkawinan. Adapun variabel independen, meliputi karakteristik perempuan, karakteristik laki-laki, dan lokasi. Persamaan empirisnya sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 X_j + \beta_3 \text{Provinsi } i + \epsilon_i$$

Variabel menunjukkan besarnya mahar/hadiah perkawinan yang diterima oleh perempuan i . Variabel merupakan sejumlah karakteristik perempuan dan keluarga perempuan, seperti nilai aset sebelum perkawinan, tingkat pendidikan saat perkawinan, umur saat perkawinan, agama, tempat tinggal desa/kota saat perkawinan, dan suku ayah kandung. Variabel merupakan karakteristik laki-laki, yaitu tingkat pendidikan saat perkawinan terjadi. Penelitian ini juga mengontrol variabel provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan statistik variabel yang digunakan ditampilkan pada Tabel 1. Jumlah observasi sebanyak 1.532 perempuan dengan rata-rata jumlah mahar/hadiah perkawinan sebesar Rp3.157.934. Jika dibandingkan antara kota dan desa, rata-rata jumlah mahar/hadiah sedikit lebih tinggi di perdesaan. Rata-rata nilai aset yang dimiliki perempuan sebesar Rp1.382.814, dimana perempuan di perkotaan memiliki aset yang jauh lebih tinggi dibanding perempuan di perdesaan.

Dari segi pendidikan, rata-rata level pendidikan perempuan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Dengan rincian hanya 6% perempuan di perdesaan yang berpendidikan tinggi, sedangkan di perkotaan sebesar 19%. Sebaliknya, terdapat 54% perempuan di perdesaan yang berpendidikan hanya sampai SD, sedangkan di perkotaan lebih sedikit, yaitu hanya sebesar 17%. Keterbatasan fasilitas pendidikan di perdesaan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan, turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan di perdesaan. Seperti halnya level pendidikan perempuan, laki-laki yang tinggal di perdesaan juga cenderung berpendidikan lebih rendah dibanding laki-laki yang tinggal di perkotaan.

Hasil regresi pada Tabel 2 menunjukkan pengaruh berbagai faktor yang diduga menentukan tinggi rendahnya jumlah mahar/hadiah perkawinan. Jumlah aset yang dimiliki perempuan sebelum menikah berpengaruh positif terhadap besarnya nilai mahar/hadiah perkawinan. Setiap satu persen tambahan aset, maka rata-rata jumlah mahar/hadiah perkawinan akan meningkat 0,07%. Jumlah aset yang dimiliki perempuan menunjukkan status ekonomi perempuan. Biasanya perempuan yang memiliki aset sebelum menikah pertama kali adalah perempuan yang sudah bekerja atau mendapatkan warisan dari orang tua. Kepemilikan aset oleh perempuan juga mencerminkan status ekonomi keluarga. Temuan studi ini mendukung temuan studi terdahulu bahwa jumlah aset yang dimiliki perempuan atau keluarganya berpengaruh positif terhadap jumlah mahar/hadiah perkawinan (Afzal, 2009).

Variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah mahar/hadiah perkawinan. Perempuan lulusan sarjana/D3 secara rata-rata memperoleh 182% lebih tinggi dibanding perempuan lulusan SD/tidak sekolah. Pada perempuan lulusan SMA, nilai mahar/hadiah perkawinan secara rata-rata lebih tinggi 83 persen dibanding yang berpendidikan SD/tidak sekolah. Temuan studi ini mendukung studi sebelumnya bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah mahar/hadiah perkawinan (Gaspart & Platteau, 2010)

Menariknya, pendidikan perempuan lebih berpengaruh di kota dibanding desa. Di desa, perempuan lulusan sarjana/D3 memperoleh mahar/hadiah perkawinan lebih tinggi 134%. Akan tetapi, pada perempuan yang berpendidikan SMP atau SMA sederajat tidak tampak perbedaan signifikan dengan perempuan lulusan SD/tidak sekolah. Hal ini berbeda dengan perempuan di perkotaan, dimana baik perempuan yang lulusan SMP, SMA, dan perguruan tinggi masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan dengan perempuan lulusan SD/tidak sekolah.

Tabel 1 Ringkasan Statistik

	Rata-rata Desa+Kota	Rata-rata Desa	Rata-rata Kota
Jumlah mahar/hadiah	3.157.934	3.199.740	3.068.497
Log jumlah mahar/hadiah	10,66	10,35	11,32
Jumlah aset sebelum menikah	1.382.814	741.053	2.755.762
Log jumlah aset sebelum menikah	5,47	4,90	6,68
Level Pendidikan Saat Menikah			
- Tidak Sekolah/SD	0,42	0,54	0,17
- SMP sederajat	0,19	0,20	0,15
- SMA sederajat	0,29	0,20	0,49
- Perguruan Tinggi	0,10	0,06	0,19
Level Pendidikan Suami			
- Tidak Sekolah/SD	0,34	0,43	0,16
- SMP sederajat	0,19	0,22	0,15
- SMA sederajat	0,33	0,28	0,44
- Perguruan Tinggi	0,13	0,08	0,25
Umur saat menikah	20,61	20,03	21,83
Dummy tinggal serumah sebelum menikah	0,18	0,20	0,12
Dummy suku			
- Bugis-Makassar-Toraja	0,13	0,11	0,15
- Jawa	0,08	0,08	0,08
- Ambon	0,14	0,09	0,23
- Lainnya	0,66	0,71	0,53
Dummy agama			
- Islam	0,60	0,55	0,70
- Protestan	0,30	0,34	0,23
- Katolik	0,08	0,08	0,07
- Lainnya	0,02	0,03	0,00
Dummy Provinsi			
- NTT	0,16	0,17	0,12
- Kaltim	0,13	0,04	0,32
- Sultra	0,17	0,20	0,09
- Maluku Utara	0,16	0,18	0,11
- Maluku	0,16	0,18	0,12
- Papua Barat	0,13	0,14	0,12
- Papua	0,10	0,09	0,12
Jumlah Observasi	1.532	1.044	488

Sumber: data sekunder (diolah)

Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan di perkotaan lebih dihargai dibanding di perdesaan. Sebaliknya, faktor status sosial atau kebangsawanan kemungkinan jauh lebih penting di perdesaan dibanding aspek pendidikan.

Tingginya biaya perkawinan mendorong sejumlah pasangan untuk tinggal serumah sebelum resmi melangsungkan perkawinan. Perempuan yang sudah tinggal serumah dengan pasangannya sebelum melangsungkan perkawinan secara resmi, secara rata-rata mereka memperoleh mahar/hadiah perkawinan yang lebih rendah 16% dibanding yang tidak tinggal serumah. Hal ini diduga terjadi karena pasangan yang tinggal serumah sudah menjalin hubungan fisik dan psikologis sehingga keluarga perempuan cenderung meringankan nilai mahar/hadiah perkawinan. Ikatan resmi sebagai suami istri tentunya lebih diharapkan oleh pasangan dan keluarganya.

Perkawinan di Indonesia sangat kental dengan pengaruh suku. Dibandingkan dengan perempuan dari keluarga Bugis-Makassar-Toraja, perempuan dari suku Ambon secara rata-rata memperoleh mahar/hadiah perkawinan yang lebih rendah 220%, sedangkan dengan suku Jawa tidak berbeda. Meskipun diduga bahwa perempuan dari suku Bugis-Makassar-Toraja memperoleh mahar/hadiah perkawinan yang secara rata-rata lebih tinggi dibanding suku lain di Indonesia, tetapi studi ini membuktikan bahwa tidak tampak perbedaan dengan suku Jawa (suku mayoritas penduduk di Indonesia).

Perbedaan agama yang dianut juga turut menjelaskan variasi jumlah mahar/hadiah perkawinan. Dibandingkan dengan perempuan yang beragama Islam, perempuan yang beragama Protestan, Katolik, dan lainnya masing-masing secara rata-rata memperoleh mahar/hadiah perkawinan yang lebih rendah sebesar 422%, 152%, dan 647%.

Dari segi lokasi, dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di Nusa Tenggara Timur, perempuan dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku secara rata-rata memperoleh mahar/hadiah perkawinan yang lebih rendah dengan perbedaan masing-masing sebesar 157%, 136%, 385%, dan 276%. Secara adat, perkawinan di Nusa Tenggara Timur, terutama pada suku Sumba, memang mengharuskan keluarga laki-laki menyerahkan uang/barang/hewan ternak kepada keluarga perempuan dengan jumlah yang cukup besar.

Tabel 2 Hasil Regresi

Variabel	(1) Desa + Kota	(2) Desa	(3) Kota
Log jumlah aset sebelum menikah	0.07*** (0.02)	0.06** (0.03)	0.08** (0.03)
Level pendidikan saat menikah (basis: SD/belum sekolah)			
- SMP sederajat	0.40 (0.36)	0.03 (0.42)	2.48*** (0.76)
- SMA sederajat	0.87** (0.38)	0.59 (0.47)	2.39*** (0.75)
- Perguruan Tinggi	1.82*** (0.53)	1.34* (0.74)	3.18*** (0.91)
Level pendidikan suami (basis: SD/belum sekolah)			
- SMP sederajat	0.58 (0.36)	0.82** (0.40)	-0.33 (0.77)
- SMA sederajat	0.36 (0.36)	0.60 (0.42)	-0.28 (0.71)
- Perguruan Tinggi	-0.01 (0.53)	0.09 (0.75)	-0.68 (0.84)
Umur saat menikah	-0.01 (0.03)	-0.03 (0.03)	0.05 (0.04)
Tinggal serumah sebelum menikah	-1.63*** (0.51)	-1.64*** (0.60)	-1.64 (1.00)
Perdesaan	0.34 (0.32)		
Suku (basis: Bugis-Makassar-Toraja)			
- Jawa	-0.55 (0.68)	-0.32 (0.78)	-1.81 (1.38)
- Ambon	-2.20*** (0.46)	-3.78*** (0.76)	-0.66 (0.67)
- Lainnya	-0.50 (0.33)	-1.05*** (0.37)	0.13 (0.62)
Agama (basis: Islam)			
- Protestan	-4.22*** (0.43)	-4.34*** (0.54)	-3.64*** (0.86)
- Katolik	-1.52** (0.70)	-1.34 (0.92)	-1.72 (1.16)
- Lainnya	-6.47*** (1.27)	-6.03*** (1.32)	-11.22*** (1.30)
Provinsi (basis: NTT)			
- Kalimantan Timur	-1.57*** (0.59)	-1.75 (1.09)	-1.71** (0.70)
- Sulawesi Tenggara	-1.36*** (0.51)	-1.77*** (0.67)	-0.78 (0.79)
- Maluku Utara	-3.85*** (0.67)	-4.05*** (0.80)	-3.62*** (1.28)
- Maluku	-2.76*** (0.53)	-3.29*** (0.70)	-1.32* (0.67)
- Papua Barat	-0.64 (0.66)	-0.56 (0.90)	-0.22 (0.97)
- Papua	0.55 (0.70)	1.29 (0.95)	-0.20 (1.01)
Konstanta	13.43*** (0.77)	15.08*** (0.96)	10.64*** (1.19)
Jumlah Observasi	1,532	1,044	488
R-Kuadrat	0.24	0.23	0.29
Robust standard errors di dalam kurung *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

Sumber: data sekunder (diolah)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah mahar/hadiah perkawinan. Studi ini menggunakan sampel individu perempuan (N=1.532) dari data *Indonesia Family Life Survey (IFLS) East* di tujuh provinsi di Indonesia bagian timur. Hasil studi ini mendukung temuan studi terdahulu dengan studi kasus di negara lain, bahwa status ekonomi keluarga perempuan dan tingkat pendidikan perempuan berpengaruh positif terhadap jumlah mahar/hadiah perkawinan. Faktor geografis, suku, dan agama juga dapat menjelaskan variasi jumlah mahar/hadiah perkawinan pada masyarakat di Indonesia bagian timur. Perempuan yang menikah di provinsi NTT secara rata-rata menerima mahar/hadiah perkawinan yang lebih tinggi dibanding sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, perempuan yang beragama Islam juga secara rata-rata memperoleh mahar yang lebih tinggi dibanding penganut agama lainnya. Terakhir, suku Bugis-Makassar-Toraja, yang dikenal secara luas memiliki jumlah mahar yang tinggi, tampaknya tidak didukung oleh studi ini. Memang jumlah mahar/hadiah perkawinan lebih tinggi dibanding suku Ambon, tapi tidak terdapat perbedaan dengan perempuan dari suku Jawa.

Hasil studi ini dapat menyediakan bukti ilmiah terhadap opini yang berkembang di masyarakat mengenai faktor-faktor penentu tingginya mahar/hadiah perkawinan, mengingat hingga saat ini belum ada studi sejenis dengan kasus di Indonesia. Tentu saja, dibutuhkan studi yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup faktor-faktor penentu jumlah mahar/hadiah perkawinan, tapi juga menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga setelah perkawinan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, S. (2009). To Estimate An Equation Explaining the Determinant of Dowry. *Munich Personal RePEc Archive Paper* (No. 19702).
- Ashraf, N., Bau, N., Nunn, N., & Voena, A. (2016). Bride Price and Female Education. *NBER Working Paper Series*, 50. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Becker, G. S. (1973). A Theory of Marriage: Part I. *Journal of Political Economy*, 81(4), 813–846.
- Edlund, L. (2006). The Price of Marriage: Net vs . Gross Flows and the South Asian Dowry Debate. *Journal of the European Economic Association*, 4(2/3), 542–551.
- Gaspart, F., & Platteau, J. (2010). Strategic Behavior and Marriage Payments: Theory and Evidence from Senegal. *Economic Development and Cultural Change*, 59(1), 149–185. <https://doi.org/10.1086/655457>.
- Makino, M. (2017). Dowry in the absence of the legal protection of women's inheritance rights. *Review of Economics of the Household*, 1–34. <https://doi.org/10.1007/s11150-017-9377-x>.
- Sikoki, B., Witoelar, F., Strauss, J., Meijer, E., & Suriastini, W. (2013). IFLS East User's Guide and Field Report. *Survey Meter and University of Southern California*.
- Zhang, J., & Chan, W. (1999). Dowry and Wife's Welfare: A Theoretical and Empirical Analysis. *Journal of Political Economy*, 107(4), 786–808.